

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan sektor manufaktur di Indonesia merupakan kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena pertumbuhan perusahaan sektor manufaktur meningkat dengan baik seiring dengan perkembangan yang pesat. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya kinerja perusahaan sektor manufaktur pada tahun 2015 dengan berkontribusi dalam peningkatan Produksi Domestik Bruto, selain perusahaan sektor manufaktur merupakan sektor terbesar di BEI.

Saat ini konsep *corporate governance* bukan lagi menjadi instrumen baru bagi manajemen korporasi, sudah banyak perusahaan yang menggunakan konsep tersebut. *Corporate Governance* adalah topik yang cukup menarik untuk dibicarakan saat ini. Konsep ini sangat penting bagi perusahaan karena memiliki fungsi untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan agar tercapainya keseimbangan antara hak dan kewajiban perusahaan untuk mencapai kinerja yang optimal dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholder* pada umumnya, serta para *stakeholder* khususnya.

Menurut Razek konsep *corporate governance* ini semakin digalakkan bukan semata karena adanya kesadaran akan pentingnya konsep ini untuk keberlangsungan perusahaan, melainkan dilatarbelakangi oleh adanya kasus-kasus skandal keuangan yang terjadi pada perusahaan-perusahaan besar yang

sempat menjadi perhatian dunia, seperti Enron, Worldcom, Merck, dan Global Crossing, HealthSouth, Palamalat, Tyco dan Xerox yang melibatkan akuntan dari perusahaan-perusahaan tersebut<sup>1</sup>.

Selain itu, menurut Boediono berita mengenai kasus beberapa perusahaan di Indonesia, seperti PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk juga melibatkan pelaporan keuangan (*financial reporting*) yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi<sup>2</sup> menambah deretan gagalnya manajemen korporasi dalam mengelola perusahaan-perusahaan tersebut. Terjadinya manipulasi laporan keuangan tersebut karena lemahnya penerapan *corporate governance* sehingga dianggap menjadi pemicu utama kemerosotan yang menimpa beberapa perusahaan besar dan krisis yang terjadi diberbagai belahan dunia.

Menurut Khomsiyah ciri utama dari lemahnya *corporate governance* adalah adanya tindakan mementingkan diri sendiri di pihak para manajer perusahaan<sup>3</sup>. Konsep *corporate governance* menjadi bukti bahwa setiap perusahaan harus melakukan pemisahan fungsi dengan baik dan benar, yaitu antara fungsi kepemilikan yang berada di tangan pemilik, dan fungsi pengelolaan yang dilaksanakan oleh manajer.

Di Indonesia *Corporate Governance* (CG) mulai di kenalkan pada seluruh perusahaan pada tahun 1998, Setelah itu pemerintah Indonesia menandatangani

---

<sup>1</sup> Razek, M. A. (2012). *The Association Between Earning Management and Corporate Governance*. Egypt: A Survey.

<sup>2</sup> Boediono, G. (2005). Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA)*, VIII. Solo.

<sup>3</sup> Darmawati, Deni, Khomsiyah, & Rahayu, R. G. (2004). Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA)*, VII. Denpasar.

Nota Kesepakatan (*Letter of Intent*) dengan *International Monetary Fund* (IMF) yang mendorong terciptanya iklim yang lebih kondusif bagi penerapan CG. Pemerintah Indonesia mendirikan satu lembaga khusus yang bernama Komite Nasional mengenai Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) melalui Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Nomor: KEP-31/M.EKUIIN/06/2000. Tugas pokok KNKCG merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional mengenai GCG, serta memprakarsai dan memantau perbaikan di bidang *corporate governance* di Indonesia.

Melalui KNKCG muncul pertama kali pedoman Umum GCG di tahun 2001, pedoman CG bidang Perbankan tahun 2004 dan Pedoman Dewan Komisaris Independen dan Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif. Pada tahun 2004 Pemerintah Indonesia memperluas tugas KNKCG melalui surat keputusan Menteri Koordinator Perekonomian RI No. KEP-49/M.EKON/II/TAHUN 2004 tentang pemebentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang memperluas cakupan tugas sosialisasi *Governance* bukan hanya di sektor korporasi tapi juga di sektor pelayanan publik. KNKG pada tahun 2006 menyempurnakan pedoman CG yang telah di terbitkan pada tahun 2001 agar sesuai dengan perkembangan.

Menurut KNKG (2006) Pedoman ini dijadikan acuan dalam menjalankan aktivitas-aktivitas bisnis oleh seluruh perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan manufaktur. Pedoman tersebut menjelaskan bahwa setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan konsep *corporate*

*governance* dengan yang telah dikeluarkan oleh KNKCG dalam laporan tahunannya. sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menciptakan persaingan yang sehat dan iklim bisnis yang kondusif melalui penerapan *corporate governance*. *Corporate governance* merupakan salah satu pilar dari ekonomi pasar. Hal ini disebabkan karena *corporate governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Oleh karena itu, dengan diterapkannya *corporate governance* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia dianggap sangat penting untuk menunjang kesuksesan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

Perusahaan-perusahaan di Indonesia belum mampu melaksanakan *corporate governance* dengan sungguh-sungguh sehingga perusahaan mampu mewujudkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah kendala yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut pada saat perusahaan berupaya melaksanakan *corporate governance* demi terwujudnya prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik. Menurut Djatmiko, kendala ini dapat dibagi tiga, yaitu kendala internal, kendala eksternal, dan kendala yang berasal dari struktur kepemilikan<sup>4</sup>.

Manurut Djatmiko kendala internal meliputi kurangnya komitmen dari pimpinan dan karyawan perusahaan, rendahnya tingkat pemahaman dari pimpinan dan karyawan perusahaan tentang prinsip-prinsip *good corporate*

---

<sup>4</sup> Djatmiko, Y. H. (2008). *Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta.

*governance*, kurangnya panutan atau teladan yang diberikan oleh pimpinan, belum adanya budaya perusahaan yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip *good corporate governance*, serta belum efektifnya sistem pengendalian internal<sup>5</sup>.

Manurut Djatmiko kendala eksternal dalam pelaksanaan *corporate governance* terkait dengan perangkat hukum, aturan dan penegakan hukum (*law-enforcement*). Indonesia tidak kekurangan produk hukum. Secara *implicit* ketentuan-ketentuan mengenai GCG telah ada tersebar dalam UUPT, Undang-undang dan Peraturan Perbankan, Undang-undang Pasar Modal dan lain-lain. Namun penegakannya oleh pemegang otoritas, seperti Bank Indonesia, Bapepam, BPPN, Kementerian Keuangan, BUMN, bahkan pengadilan sangat lemah. Oleh karena itu diperlukan test-case atau kasus preseden untuk membiasakan proses, baik yang yudisial maupun quasi-yudisial dalam menyelesaikan praktik-praktik pelanggaran hukum perusahaan atau GCG. Secara keseluruhan penegakan aturan untuk penerapan CG belum ada sanksi yang memberikan efek jera bagi perusahaan yang tidak menerapkannya, namun di sektor perbankan telah dicoba untuk dimasukkan beberapa hal yang terkait dengan kewajiban Bank dalam menerapkan CG yang berujung pada sanksi bagi bank-bank yang tidak mengikuti aturan tersebut. Baik kendala internal maupun kendala eksternal sama-sama penting bagi perusahaan. Namun, jika kendala internal bisa dipecahkan maka kendala eksternal akan lebih mudah diatasi<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> *Ibid.*,

Menurut Djatmiko kendala yang ketiga adalah kendala yang berasal dari struktur kepemilikan. Berdasarkan persentasi kepemilikan dalam saham, kepemilikan terhadap perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepemilikan yang terkonsentrasi dan kepemilikan yang menyebar. Kepemilikan yang terkonsentrasi terjadi pada saat suatu perusahaan dimiliki secara dominan oleh seseorang atau sekelompok orang saja (40% atau lebih). Kepemilikan yang menyebar terjadi pada saat suatu perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang banyak dengan jumlah saham yang kecil-kecil (satu pemegang saham hanya memiliki saham sebesar 5% atau kurang)<sup>7</sup>.

Menurut Boediono mekanisme *good corporate governance* memiliki kemampuan dalam kaitannya menghasilkan suatu laporan keuangan yang memiliki kandungan informasi laba<sup>8</sup>. Menurut Ujiyantho dan Pramuka laporan keuangan harus menunjukkan informasi yang sebenarnya, agar tidak menyesatkan pihak pengguna laporan. Kebijakan dan keputusan yang diambil akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja<sup>9</sup>.

Menurut Agoes tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, Pemegang Saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> Boediono, G., *loc. cit.*,

<sup>9</sup> Ujiyantho, A. M., & Pramuka, B. A. (2007). Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi, X*. Makassar.

disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya<sup>10</sup>.

Menurut Guna dan Herawaty *profitability* adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Laba sering kali menjadi ukuran kinerja perusahaan, dimana ketika perusahaan memiliki laba yang tinggi berarti dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan tersebut baik dan juga sebaliknya. *Profitability* merupakan suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan perusahaan<sup>11</sup>.

Berkaitan dengan manajemen laba, menurut Guna dan Herawaty tingkat *profitability* perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan. *Profitability* merupakan suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan perusahaan<sup>12</sup>. Menurut Scott perusahaan cenderung melakukan manajemen laba saat memperoleh tingkat *profitability* tinggi. Tingkat *profitability* yang stabil akan memberikan keyakinan pada investor bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik dalam menghasilkan laba<sup>13</sup>. *Profitability* dapat memengaruhi manajer untuk melakukan manajemen laba. Karena jika *profitability* yang didapat perusahaan rendah, umumnya manajer akan melakukan tindakan manajemen laba untuk menyelamatkan kinerjanya di mata pemilik. Hal ini

---

<sup>10</sup> Agoes, S. (2009). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan)*, oleh Kantor Akuntan Publik (Vol. II). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

<sup>11</sup> Guna, W., & Herawaty, A. (2010). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Independensi Auditor, Kualitas Audit, dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 12(1), 53-68.

<sup>12</sup> *Ibid.*,

<sup>13</sup> Scott, W. R. (2009). *Financial Accounting Theory*. Canada: Prentice Hall Canada Inc.

berkaitan erat dengan usaha manajer untuk menampilkan performa terbaik dari perusahaan yang dipimpinnya.

Menurut Gunawan dkk rasio *profitability* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Terdapat dua rasio *profitability* yang sering digunakan dalam mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba, yaitu *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). *Return On Assets* (ROA) diukur dengan membagi antara laba bersih setelah pajak (*net income after tax*) dengan total aset. Sedangkan *Return On Equity* (ROE) diukur dengan membagi antara laba bersih setelah pajak (*net income after tax*) dengan ekuitas (total modal sendiri)<sup>14</sup>.

Menurut Guna dan Herawaty *leverage* merupakan rasio antara total kewajiban dengan total aset. Semakin tinggi nilai *leverage* maka risiko yang akan dihadapi oleh investor akan semakin tinggi dan para investor akan meminta keuntungan yang semakin besar. Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio *leverage* juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. Semakin tinggi nilai *leverage* maka risiko yang akan dihadapi oleh investor akan semakin tinggi dan para investor akan meminta keuntungan yang semakin besar. Oleh karena itu, semakin besar *leverage* maka kemungkinan manajer perusahaan untuk

---

<sup>14</sup> Gunawan, I. K., Darmawan, N. A., & Purnamawati, I. A. (2015). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Skripsi Akuntansi Program S1*, 3 (1).

melakukan manajemen laba agar laba perusahaan terlihat stabil akan semakin besar<sup>15</sup>.

Menurut Gunawan dkk dua indikator pengukuran variabel *leverage* yang sering digunakan adalah *debt to total asset ratio* dan *debt to equity ratio*. Rasio hutang terhadap total aktiva (*debt to total asset ratio*) diukur dengan membagi antara total hutang dengan total aset, sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*) diukur dengan cara membagi total hutang perusahaan dengan ekuitas<sup>16</sup>.

Menurut Herawaty manajemen laba merupakan suatu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen (agent) yaitu dalam proses penyusunan laporan keuangan<sup>17</sup>. Menurut Wild dan Subramanyam manajemen laba adalah intervensi yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak manajemen dalam proses penentuan laba dan biasanya dilakukan untuk tujuan pribadi<sup>18</sup>. Menurut Wild dan Subramanyam manajemen laba dapat berupa khiasan untuk mempercantik laporan keuangan jika manajer memanipulasi tindakan akrual yang tidak memiliki konsekuensi terhadap arus kas. Selain itu manajemen laba juga dapat terlihat nyata jika manajer memilih tindakan dengan konsekuensi arus jasa dengan tujuan mengubah laba<sup>19</sup>. Menurut Mahiswari dan Nugroho manajemen laba dihitung berdasarkan proksi *discretionary accrual* dengan

---

<sup>15</sup> Guna, W., & Herawaty, A., *loc. cit.*,

<sup>16</sup> Gunawan, I. K., Darmawan, N. A., & Purnamawati, I. A., *loc. cit.*,

<sup>17</sup> Herawaty, V. (2008). Peran Praktek Corporate Governance Sebagai Moderating Variable dari Pengaruh Earnings Management Terhadap Nilai Perusahaan. *10 (2)*, pp. 97-108. Pontianak: Simposium Nasional Akuntansi 11.

<sup>18</sup> Wild, J., & Subramanyan, K. R. (2009). *Analisis Laporan Keuangan* (10th ed.). Jakarta: Salemba Empat.

<sup>19</sup> *Ibid.*,

menggunakan *modified jones model* karena model ini dianggap lebih baik di antara model lain untuk mengukur manajemen laba<sup>20</sup>.

Dalam hal ini, Peneliti menggunakan proksi *discretionary accrual* dengan menggunakan *modified jones model* sebagai alat ukur manajemen laba. Peneliti juga menggunakan beberapa karakteristik *corporate governance* untuk mengetahui pengaruhnya terhadap manajemen laba, yakni ukuran dewan komisaris independen, ukuran komite audit, *profitability* (ROA) dan *leverage* (DER).

Menurut Arifin dan Destriana pada dasarnya *profitability* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan aktiva atau modal yang digunakan. Perusahaan yang memiliki tingkat *profitability* yang rendah maka akan lebih besar kemungkinan terjadinya manajemen laba dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki tingkat *profitability* yang tinggi<sup>21</sup>. Lalu, menurut Arifin dan Destriana *leverage* merupakan salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hutang jangka panjang terhadap asset perusahaan. Dengan tingkat *leverage* yang tinggi, maka akan lebih besar terjadinya manajemen laba dibandingkan dengan tingkat *leverage* kecil. Namun, jika tingkat *leverage* tinggi perusahaan dapat melakukan pinjaman jangka panjang yang besar dan dapat meningkatkan

---

<sup>20</sup> Mahiswari, R., & Nugroho, P. I. (2014). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17 (1), 1-20.

<sup>21</sup> Arifin, L., & Destriana, N. (2016). Pengaruh Firm Size, Corporate Governance, dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 18 (1), 84-93.

*profitability*, tetapi di sisi lain hutang yang tinggi dapat meningkatkan risiko kebangkrutan<sup>22</sup>.

Dari beberapa kelompok perusahaan, perusahaan manufaktur memiliki risiko bisnis yang besar sehingga pelaksanaan manajemen laba paling mungkin sering terjadi di perusahaan manufaktur. Seperti halnya kasus yang terjadi pada perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang farmasi di Indonesia yaitu Kimia Farma.

Menurut Mitton Penelitian mengenai *corporate governance*, *leverage*, dan *profitability* terhadap manajemen laba sudah banyak dilakukan dengan hasil yang beragam. Ada yang menemukan hubungan positif, hubungan negatif, ataupun yang tidak menemukan hubungan sama sekali pada keempat variabel tersebut. Perbedaan hasil penelitian tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yakni perspektif teoritis yang diterapkan, metodologi penelitian, pengukuran kinerja, dan perbedaan pandangan atas keterlibatan dewan dalam pengambilan keputusan<sup>23</sup>.

Dalam penelitian Arifin dan Destriana disimpulkan bahwa dewan komisaris independen, *profitability*, dan *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba<sup>24</sup>. Namun dalam penelitian Mahiswari dan Nugroho menyimpulkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh yang negatif terhadap manajemen laba, sedangkan dewan komisaris independen dan komite audit

---

<sup>22</sup> *Ibid.*,

<sup>23</sup> Mitton, T. (2002). A Cross-Firm Analysis of The Impact of Corporate Governance on The East Asian Financial Crisis. *Journal of Financial Economics*, 64(2), 215-241.

<sup>24</sup> Arifin, L., & Destriana, N., *loc. cit.*,

tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba<sup>25</sup>. Lalu, dalam penelitian Agustia menyimpulkan bahwa komite audit dan dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan *leverage* memiliki pengaruh terhadap manajemen laba<sup>26</sup>.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa fenomena manajemen laba sangat menarik untuk diteliti karena dapat memberikan informasi perihal perilaku manajer dalam melaporkan kegiatannya pada suatu periode tertentu, yaitu kemungkinan adanya kegiatan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer dengan melakukan manipulasi laba perusahaannya menjadi lebih tinggi, rendah ataupun selalu sama dalam beberapa periode tertentu, karena dengan adanya kejadian yang diluar dugaan manajer maka akan mendorong mereka untuk mengatur data keuangan khususnya laba yang dilaporkan.

Botosan mengungkapkan bahwa semakin lengkap tingkat pengungkapan akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan maka akan semakin rendah *cost of equity capital*nya. Hal ini menunjukkan bahwa asimetri informasi antara investor (pemilik) dan manajer menjadi semakin rendah dan investor lebih mempercayai informasi yang disajikan perusahaan, sehingga *minimum return* yang diharapkan akan semakin rendah<sup>27</sup>.

Berdasarkan uraian dan permasalahan pada latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Corporate*

---

<sup>25</sup> Mahiswari, R., & Nugroho, P. I., *loc. cit.*,

<sup>26</sup> Agustia, D. (2013). Pengaruh Faktor Good Corporate Governance, Free Cash Flow, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15 (1), 27-42.

<sup>27</sup> Botosan, A. C. (1997). Disclosure Level and The Cost of Equity Capital. *The Accounting Review*, 72(3), 323-349.

*Governance*, *profitability* dan *leverage* terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011 – 2015”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2015?
2. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011 – 2015?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011 – 2015?
4. Apakah *profitability* berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011 – 2015?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan komisaris independen mempengaruhi manajemen laba.
2. Untuk mengetahui apakah ukuran komite audit mempengaruhi manajemen laba.
3. Untuk mengetahui apakah *leverage* mempengaruhi manajemen laba.
4. Untuk mengetahui apakah *profitability* mempengaruhi manajemen laba.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap bukti empiris mengenai pengaruh *corporate governance*, *leverage*, dan *profitability* terhadap manajemen laba.
2. Untuk perusahaan, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemilik perusahaan dan pihak manajemen untuk meningkatkan kualitas *corporate governance*, *leverage*, dan *profitability* agar dapat mengurangi pelaksanaan manajemen laba.
3. Untuk pihak pengusaha, penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para investor, kreditor, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan.